

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan perempuan dalam urusan politik pada masa kini sangat berbeda dengan kondisi perempuan dimasa lalu. Perbedaan itu bisa terjadi karena kondisi sosio-kultural maupun perkembangan zaman. Salah satunya ialah bagaimana keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Keterlibatan perempuan didunia politik bukanlah sesuatu hal yang baru. Jika dilihat dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam konteks pembangunan telah banyak kemajuan yang dicapai terutama dibidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan dan pemerintahan. Seperti contoh dalam sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia, terdapat tokoh-tokoh perempuan seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, dan sebagainya. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Dalam perkembangan partisipasi perempuan di era kontemporer, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa perempuan Indonesia *high in quantity, tapi low in power*. Jumlah perempuan banyak, tapi tidak memiliki kekuatan. Hal tersebut dilihat dari bagaimana perkembangan tinggi rendahnya persentase partisipasi politik perempuan dalam dunia politik, meskipun secara normatif pemerintah sudah melahirkan berbagai Perundangan yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah di ranah politik.¹ Namun sampai sejauh ini data menunjukkan capaian yang belum memenuhi harapan minimal eksistensi perempuan di ranah politik. Jika kita melihat tren keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal 92.

Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu indikator nyata “power” yang dimiliki masih menyisakan masalah.

Pembicaraan mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia bersentuhan dengan upaya memajukan demokrasi. Setiap warga negara di negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik.² Dalam perkembangannya, perempuan dalam bingkai politik belum sampai pada tingkat maksimal. Meskipun secara historis keterlibatan kaum perempuan diranah politik di Indonesia memiliki akar yang panjang, namun realitas kekinian justru memperlihatkan hal yang tidak cukup menggembirakan.

Kalau dilihat dari segi perbandingan antara jumlah populasi perempuan Indonesia yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah penduduk, dengan mereka yang terlibat politik.³ Rendahnya keterwakilan anggota legislatif perempuan disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang masih mengental dalam masyarakat kita. Penelitian yang ditulis oleh Siti Nimrah dan Sakaria (Mahasiswa Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin) mengungkapkan bahwa dominasi laki-laki masih terjadi disetiap bidang, sehingga perempuan yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2014. Telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif tahun 2014, salah satunya dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Perempuan berpikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah.⁴ Namun

² Undang-undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

³ Siti Nimrah dan Sakaria. 2015. Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014). *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol 1. No. 2. Hal 2.

⁴ Ibid. Hal 2-3

begitu banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu budaya patriarki yang terus meluas.

Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia di dalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun, jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau di sektor-sektor strategis pengambilan keputusan atau kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilu, anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan makhluk lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.⁵

Perempuan dan politik merupakan konsep yang mempertemukan antara sekelompok orang berjenis kelamin perempuan dan negara. Ruang politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kepentingan negara dalam menaungi berbagai kepentingan rakyatnya. Ruang politik terbuka diwujudkan melalui agenda negara yang bernama Pemilihan Umum atau yang sering disebut Pemilu.⁶

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah yang demokratis. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berpaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.⁷ Senada

⁵ Ibid. Hal 3.

⁶ Anis Izdiha. 2017. Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol 4. No. 2. Hal 37.

⁷ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. Hal 461.

dengan hal tersebut, Robert Dahl menyatakan bahwasannya sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus memiliki sebuah perwujudan seperti partisipasi dan kontestasi yang mewujud pada dibukanya kran sistem multipartai dan pemilu yang bebas dan adil.⁸ Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik.

Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 memberikan kesempatan kepada semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk turut berpartisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁹ Partisipasi politik telah menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi merupakan proses politik yang melibatkan seluruh warga negara baik itu laki-laki maupun perempuan.

Dalam perkembangannya, tingkat partisipasi politik warga negara, khususnya dalam pemilu tidak selalu menunjukkan tingkatan yang sama. Dalam kaitan ini, ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik termasuk partisipasi politik dalam kegiatan pemilu. Menurut Ramlan Surbakti, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain: kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan situasi.¹⁰

⁸ Wahyu Widodo. 2018. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum. *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol 1. No 1. Hal 24.

⁹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 367.

¹⁰ Rani Safitri, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto., MH. 2017. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2. No. 1. Hal 101.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu bisa dilakukan sebagai pemilih. Pemilih perempuan merupakan kelompok yang sangat potensial dalam menentukan nasib bangsa ini. Karena jumlahnya yang banyak dan juga perempuan memiliki perbedaan baik dalam visi dan konsep tentang politik yang berasal dari kodratnya sebagai perempuan maupun perannya sebagai ibu. Oleh karena itu di asumsikan bahwa perempuan akan membawa fokus dan nilai-nilai perempuan ke dalam politik. Dan juga perempuan diharapkan bisa memilih calon pemimpin secara cerdas dan selektif.

Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi. Dimana pemilu diadakan pada tanggal 17 April 2019. Indonesia serentak melaksanakan pesta demokrasi berupa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan juga Pemilihan Legislatif (Pileg). Namun disini peneliti akan memfokuskan untuk meneliti Pemilihan Legislatif (Pileg)

Sumatera Barat merupakan salah satu di antara daerah yang ikut serta pada Pileg tahun 2019. Jumlah partisipasi pemilih terbanyak di Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Kota Padang sendiri memiliki 11 Kecamatan dan di antara 11 Kecamatan tersebut, Kecamatan Koto Tangah merupakan Kecamatan paling banyak pemilih. Pemilih perempuan terbanyak juga terdapat di Kecamatan Koto Tangah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga antusias dalam berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan Pileg tahun 2019. Partisipasi yang dilakukan oleh perempuan sangat menentukan hasil dari Pileg, selain dari itu partisipasi politik perempuan juga merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berarti dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tinjauan peneliti terdahulu mengenai partisipasi perempuan dalam politik itu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Ana Maria Gadi Djou, MA dan Liza Quintarti (2018) dengan judul penelitian “partisipasi perempuan dalam

partai politik dan pemilu serempak” yang mengatakan bahwasannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan didalam parlemen sejatinya tidak hanya berbicara agar perempuan mampu mengakomodir kepentingan semata, tetapi juga terdapat nilai-nilai yang lebih dalam, yaitu etika kepedulian yang menggambarkan cara khas perempuan dalam bereksistensi.¹¹

Penelitian lain serupa juga dilakukan oleh Eko Ari Wibowo, Muradi, dan Arif Sudirman (2019) dengan judul “strategi sosialisasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada serentak di kota Magelang” yang mengatakan bahwasannya pendekatan yang paling efektif digunakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada serentak di Kota Magelang adalah pendekatan formal, informal dan media massa.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu peneliti memfokuskan untuk meneliti partisipasi dari pemilih perempuan, serta peneliti ingin melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada Pileg tahun 2019 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan menggunakan teori partisipasi politik Ramlan Surbakti.

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait partisipasi pemilih perempuan pada Pileg dengan judul: **“Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang”**.

¹¹ Ana Maria Gadi Djou MA dan Liza Quintarti. 2018. Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak. *Jurnal UNNES*. Vol.4. No. 3. Hal 610.

¹² Eko Ari Wibowo, dkk. 2019. Strategi Sosialisasi Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pilkada Serentak di Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 05. No. 01. Hal 41-41.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya membuat peneliti mencari lebih jauh mengenai data yang berkaitan dengan penelitian ini. Disini peneliti memfokuskan untuk meneliti partisipasi dari pemilih perempuan, dengan begitu peneliti dapat melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 menyisakan banyak fenomena politik, salah satunya adalah partisipasi politik pemilih perempuan di Kota Padang. Kota Padang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat memiliki 11 Kecamatan, yang mana masing-masing Kecamatan tersebut memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut data jumlah DPT yang terdapat di setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.1
Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap Kecamatan di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

No	Kecamatan	LK	PR	Total pemilih
1	Bungus Teluk Kabung	8.986	8.846	17.832
2	Koto Tangah	62.240	63.860	126.100
3	Kuranji	46.604	48.022	94.626
4	Lubuk Begalung	37.217	38.325	75.542
5	Lubuk Kilangan	17.835	18.260	36.095
6	Nanggalo	17.741	19.368	37.109
7	Padang Barat	14.106	15.144	29.250
8	Padang Selatan	18.736	19.564	38.300
9	Padang Timur	25.138	26.653	51.701
10	Padang Utara	21.703	22.650	44.353
11	Pauh	20.396	20.975	41.371

Sumber : *diolah dari data KPU kota Padang*

Dari tabel 1.1 di atas, dapat kita lihat bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah DPT terbanyak terdapat di Kecamatan Koto Tangah. Jumlah DPT di Kecamatan Koto Tangah berjumlah 126.100 pemilih, dimana pemilih perempuan terbanyak juga

terdapat di Kecamatan Koto Tangah yaitu berjumlah 63.860 pemilih. Setiap masyarakat yang terdaftar dalam DPT, tentu tidak semua yang akan menggunakan hak pilihnya pada pileg tahun 2019. Berikut data jumlah pengguna hak pilih di setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.2
Jumlah Pengguna Hak Pilih di Setiap Kecamatan di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019

No	Kecamatan	LK	PR	Total
1	Bungus Teluk Kabung	6.700	7.456	14.156
2	Koto Tangah	44.827	52.661	97.488
3	Kuranji	34.699	40.656	75.355
4	Lubuk Begalung	28.897	33.395	62.292
5	Lubuk Kilangan	13.057	15.384	28.441
6	Nanggalo	14.134	17.084	31.198
7	Padang Barat	10.746	12.366	23.112
8	Padang Selatan	15.374	17.643	33.017
9	Padang Timur	19.183	22.717	41.900
10	Padang Utara	13.904	16.508	30.412
11	Pauh	15.293	17.431	32.724

Sumber : diolah dari data KPU Kota Padang

Dari tabel 1.2 di atas, dapat kita lihat bahwasannya partisipasi pemilih terbanyak terdapat di Kecamatan Koto Tangah yang berjumlah 97.488 pemilih. Dan juga partisipasi pemilih perempuan terbanyak juga terdapat di Kecamatan Koto Tangah yang berjumlah 52.661 pemilih. Jika melihat dari Pileg tahun 2014 lalu di Kota Padang, tingkat partisipasi pemilih perempuan dari tahun 2014 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah juga mengalami peningkatan. Berikut data jumlah perbandingan partisipasi pemilih tahun 2014 dan tahun 2019 di setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1.3
Jumlah perbandingan pengguna hak pilih di setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 dan 2019

No	Kecamatan	Lk (2014)	Pr (2014)	Total (2014)	Lk (2019)	Pr (2019)	Total (2019)
1	Bungus teluk kabung	5.334	6.033	11.367	6.700	7.456	14.156
2	Koto tengah	32.121	40.079	72.200	44.827	52.661	97.488
3	Kuranji	23.759	29.955	53.714	34.699	40.656	75.355
4	Lubuk begalung	20.819	26.049	46.868	28.897	33.395	62.292
5	Lubuk kilangan	8.987	11.350	20.337	13.057	15.384	28.441
6	Nanggalo	10.319	13.336	23.655	14.134	17.084	31.198
7	Padang barat	8.952	9.821	18.773	10.746	12.366	23.112
8	Padang selatan	12.060	14.697	26.757	15.374	17.643	33.017
9	Padang timur	14.239	18.016	32.255	19.183	22.717	41.900
10	Padang utara	9.883	12.621	22.504	13.904	16.508	30.412
11	Pauh	10.558	13.186	23.744	15.293	17.431	32.724

Sumber: *diolah dari data KPU Kota Padang*

Kecamatan Koto Tengah sendiri memiliki 13 kelurahan. Berikut data pengguna hak pilih di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tengah.

Tabel 1.4
Jumlah Pengguna Hak Pilih di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tengah pada Pemilihan legislatif di Kota Padang tahun 2019

No	Kelurahan	LK	PR	Total
1	Aia pacah	3.498	3.528	7.026
2	Balai gadang	5.527	5.622	8.181
3	Batang kabung gantiang	3.975	4.206	8.181
4	Batipuh panjang	4.998	5.120	10.118
5	Bungo pasang	5.148	5.148	10.296
6	Dadok tunggul hitam	6.954	7.007	13.961
7	Koto panjang ikua koto	4.322	4.455	8.777
8	Koto pulai	1.050	978	2.208
9	Lubuak buayo	7.258	7.440	14.698
10	Lubuak minturun	3.168	3.304	6.472
11	Padang sarai	5.963	6.224	12.187
12	Parupuak tabiang	6.406	6.805	13.211
13	Pasie nan tigo	3.959	4.020	7.979

Sumber : *diolah dari data KPU Kota Padang*

Dari data yang telah peneliti paparkan, dapat dilihat bahwasannya tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat kita lihat dari naiknya jumlah keikutsertaan

perempuan dalam ikut memilih memberikan suara dari pemilu legislatif tahun 2014 hingga tahun 2019. Peneliti berasumsi bahwasannya kesadaran politik warga negara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah pada pemilu legislatif tahun 2019.

Meningkatnya kesadaran politik pemilih perempuan dalam memilih menjadi salah satu asumsi peneliti yang menjelaskan bahwa kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan pemilih perempuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilih perempuan untuk terlibat dalam proses partisipasi politik.

Hal seperti itu disampaikan oleh Diah Mulyani Indrawati, salah satu warga Kecamatan Koto Tangah sekaligus seorang Mahasiswa, ia menyatakan bahwa :

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi saya dalam berpartisipasi politik. Namun faktor yang paling mempengaruhi saya tentu berasal dari dalam diri saya. Yaitu kesadaran politik yang saya miliki yang dapat membuat saya ikut dalam memberikan suara pada pileg tahun 2019. Karena menurut saya kesadaran politik itu penting untuk mendorong diri saya berpartisipasi dalam politik.¹³

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah yang menyatakan bahwa :

Kesadaran politik merupakan faktor yang paling mempengaruhi saya dalam ikut memilih pada pileg tahun 2019 kemaren. Dengan kesadaran yang ada dalam diri saya, membuat saya ikut berpartisipasi pada Pileg tahun 2019. Karena partisipasi politik yang saya lakukan ini nantinya dapat membuat perubahan untuk Indonesia khususnya Kecamatan Koto Tangah tempat saya tinggal agar menjadi lebih baik lagi, meskipun perubahan itu kecil. Bayangkan jika sebagian masyarakat Indonesia tidak memiliki kesadaran akan politik, lalu berakibat tidak ikut serta dalam pemilihan legislatif lantas bagaimana dengan masa depan Indonesia nantinya.¹⁴

¹³ Wawancara awal dengan Diah Mulyani Indrawati, warga Kecamatan Koto Tangah, pada tanggal 24 Agustus 2019.

¹⁴ Wawancara awal dengan Maharani Kurnia Sari, warga Kecamatan Koto Tangah, pada tanggal 24 Agustus 2019.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Desriati, salah satu warga Kecamatan Koto Tangah sekaligus Ibu Rumah Tangga, ia menyatakan bahwa:

Pada pemilu legislatif kemaren, jelas saya ikut memilih. Karena itu merupakan hak saya sebagai warga negara untuk turut serta memberikan hak suara saya. Menurut saya sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta dalam mendukung kesuksesan pemilu. Karena bagaimanapun nasib negara ini ada di tangan kita. Oleh karena itu, menurut saya kesadaran akan politik sangat penting harus ada dalam diri masing-masing individu.¹⁵

Penggambaran dari hasil wawancara awal di atas menunjukkan apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Beberapa pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah mengatakan bahwasannya kesadaran politik yang berasal dari dalam diri mendorong seseorang untuk ikut memilih.

Dari realitas di atas, setidaknya menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tangah diiringi dengan kecenderungan adanya kesadaran politik oleh pemilih perempuan. Hal ini tergambar dari adanya rasa kesadaran pemilih perempuan untuk ikut serta memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif tahun 2019 yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi Kecamatan Koto Tangah kedepan.

Kesadaran politik yang dijadikan peneliti sebagai asumsi penelitian didasari oleh data awal wawancara tersebut. Namun, kesadaran politik tentu bukan menjadi faktor tunggal yang menjadikan tingginya angka partisipasi politik pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah pada pemilu legislatif tahun 2019. Pengaruh dari dalam diri dan luar diri seseorang menentukan keikutsertaan seseorang dalam berpolitik, baik sekedar memilih ataupun untuk dipilih. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih

¹⁵ Wawancara awal dengan Desriati, warga Kecamatan Koto Tangah, pada tanggal 24 Agustus 2019.

perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Peneliti menggunakan konsep partisipasi politik milik Ramlan Surbakti yang terbagi atas lima faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan status ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, dan kesadaran politik sebagai teori untuk membedah fenomena tersebut, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang pada pemilu legislatif tahun 2019 dapat terjawab.

Melihat dari meningkatnya partisipasi pemilih perempuan pada pileg tahun 2014 ke tahun 2019 tentu menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dikaji secara mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti **apakah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan terkait partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan penambahan ilmu atau juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut terkait partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan umum legislatif.

2. Secara Praktis

Diharapkan untuk menjadi referensi tambahan terkait partisipasi pemilih perempuan. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

